



PDNKK Segera

Dirombak Total

Semarapura (Bali Post) -

Kondisi Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) yang karut-marut ternyata sudah disadari Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Menyikapi hal itu, akan segera dilakukan perombakan secara menyeluruh. Mulai dari manajemen hingga unit usahanya.

"PDNKK tidak mampu menutupi biaya operasionalnya. Ada kerugian, tetapi tidak banyak. Kita akan segera ambil langkah-langkah. Harus segera direvitalisasi," ungkapnya, Selasa (17/7) kemarin.

Orang nomor satu di Klungkung asal Nusa Ceningan Kecamatan Nusa Penida ini mengungkapkan, perusahaan tersebut menggarap percetakan dan penjualan alat tulis kantor (ATK). Guna mendongkrak pendapatannya, diakui seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diimbau untuk bisa bekerja sama. Namun, hal tersebut diwarnai riak-riak.

"Tetapi saya tidak akan memaksa karena waktu itu hanya imbauan. Awalnya tetap bisa berjalan. Seiring dengan waktu, rupanya semakin berkurang. Jadi PDNKK tidak mampu menutupi biaya operasionalnya," katanya. Tak dimungkiri, perlakuan pemkab terhadap perusahaan yang juga mengelola sarang walet di Nusa Penida ini kurang maksimal. Ada kesan "menganaktirikan". Berbeda hal-

nya dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diberikan penyertaan modal supaya bisa semakin berkembang. "Kita akan segera support. Harus ada penyertaan modal," sebutnya.

Perusahaan ini juga dinilai harus mampu menangkap peluang-peluang yang ada dalam daerah. Misalnya, menggarap *city tour* yang membebaskan pungutan. Mendukung ini, juga diperlukan keberanian dari manajemen dan harus memiliki visi misi yang lebih luas. "Perusahaan ini mungkin bisa sebagai badan pengelola. Tidak hanya berkuat pada usaha yang ada sekarang saja. Perusahaan harus bisa zaman *now* juga. Ada peluang-peluang yang bisa ditangkap," tegas mantan *Manager* Koperasi Pasar Srinadi ini.

Diakui pula, selama ini sumber daya manusia (SDM) pada perusahaan itu tidak mau mengembangkan diri. Ada kecenderungan mengikuti keadaan. Suwirta pun mengaku *ewuh-pakewuh* menyikapi ini. "Kalau dikeluarkan, kasihan. Sekarang saya mencari pengganti

direktur. Harus lebih berani," imbuhnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Klungkung I Ketut Sukma Sucita menuding kondisi perusahaan yang demikian sebagai imbas manajemen yang tak inovatif dalam pengelolaan. "Perusahaan ini perlu berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan, barang apa yang layak dijual untuk mengembangkan perusahaan. Tidak saja berpatokan dengan unit yang ada sekarang. Tetapi bagaimana bisa mengembangkan produk-produk lain," ungkapnya.

Ketua DPD Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Klungkung ini menilai sesungguhnya perusahaan tersebut telah memiliki pangsa yang jelas. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Klungkung telah menjadi pelanggan percetakan dan penjualan alat tulis

kantor. Seharusnya ini perlu dikelola sebaik mungkin. "Bupati sudah memberikan surat edaran yang mengimbau OPD untuk melakukan percetakan di sana. Begitu juga dengan ATK. Ini kan sudah jelas. Harus ditindaklanjuti lagi dengan komunikasi. Jangan dibiarkan begitu saja," tegasnya. (kmb45)



I Nyoman Suwirta

Bali Post/scr

Edisi : Rabu, 18 Juli 2018

Hal : 12



Disparbud Bangun Menara Pandang di Kawasan Hutan TWA Penelokan

Bangli (Bail Post) -

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) kini tengah membangun menara pandang di kawasan hutan taman wisata alam (TWA) Penelokan, Kintamani. Pembangunan menara pandang yang menelan anggaran sekitar Rp 1 miliar itu dilakukan dengan tujuan untuk menambah destinasi wisata baru di Kintamani.

Kabid Bina Objek Disparbud Bangli Wayan Bona, Senin (16/7) kemarin mengatakan, proyek pembangunan menara pandang sudah berjalan sejak hampir sebulan terakhir. Proyek yang dibangun dengan dana alokasi khusus (DAK) tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

Dijelaskan Bona, menara pandang yang dibangun di kawasan hutan tersebut memiliki tiga lantai. Dari menara pandang itu, nantinya wisatawan bisa menikmati keindahan panorama Gunung dan Danau Batur serta

kawasan lainnya di Geopark Batur secara jelas.

Bona mengatakan menara pandang ini sengaja dibangun untuk menambah destinasi wisata baru. Dengan keberadaan menara pandang tersebut nantinya wisatawan bisa memiliki lokasi pilihan yang baru untuk menikmati keindahan pemandangan Gunung dan Danau Batur, selain dari Penelokan. "Dengan dibangun menara pandang ini, maka akan ada destinasi baru sehingga kunjungan wisatawan ke Kintamani meningkat dan berimbas pada meningkatnya PAD," jelasnya. Di samping itu diharapkan nantinya perekonomian masyarakat di sekitarnya akan menjadi semakin bergeliat.

Sementara itu, Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali Sulisty Widodo saat dikonfirmasi terpisah mengatakan, lahan hutan yang dimanfaat-

kan untuk pembangunan menara pandang tersebut sudah dikerjasamakan antara BKSDA dengan Pemkab Bangli. Namun, berapa luas lahan yang dipakai untuk membangun menara pandang tersebut pihaknya mengaku kurang hafal. "Yang jelas sudah ada kerja sama antara BKSDA dengan Bupati Bangli," ujarnya.

Dikatakan Sulisty, selain dibangun untuk menikmati view Gunung dan Danau Batur oleh wisatawan, keberadaan menara pandang tersebut juga bisa dimanfaatkan BKSDA untuk memantau dan mengawasi kawasan hutan bilamana terjadi kebakaran. Diharapkannya, keberadaan menara pandang tersebut nantinya bisa menarik lebih banyak kunjungan wisatawan ke Kintamani dan berimbas pada semakin menggeliatkan perekonomian masyarakat sekitar yang selama ini sudah banyak berkecimpung pada dunia pariwisata. (kmb40)

Edisi : Selasa, 17 Juli 2018

Hal : 14



Siswa Baru SD dan SMP Dapat Seragam Gratis

Selain seragam lengkap dengan tas dan sepatu bagi murid SD dan SMP, murid kelas VII SMP dan puluhan guru juga akan mendapat laptop.

MANGUPURA, NusaBali

Sama seperti tahun tahun lalu, tahun pelajaran 2018/2019 seluruh siswa baru jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) akan mendapatkan seragam gratis dari Pemerintah Kabupaten Badung. Untuk pengadaan seragam sekolah itu, Pemkab Badung menggelontor anggaran Rp 25,1 miliar lebih.

Seragam yang diberikan untuk siswa SMP kelas VII meliputi putih biru, pakaian endek, pakaian pramuka, pakaian olahraga, dan sepatu, kaos kaki, ikat pinggang serta tas. Begitu juga siswa SD kelas I mendapat pakaian merah putih, endek, olahraga, pramuka, sepatu, kaos

kaki, ikat pinggang, dan tas.

"Total pagu anggaran untuk semua pengadaan pakaian gratis ini yakni untuk SMPN digelontor anggaran Rp 13.586.001.000 dan untuk anggaran pakaian SDN Rp 11.521.943.400," ungkap Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikpora Kabupaten Badung I Made Mandi, Minggu (15/7).

Menurut Mandi, pengadaan untuk seragam serta perlengkapan lainnya masih berproses. Saat ini pihaknya masih menunggu data final dari masing-masing sekolah, misalnya berapa jumlah murid laki-laki dan perempuan. "Sekarang masih dalam pelaksanaan PLS (pengenalan lingkungan sekolah). Kemungkinan jumlah siswa bertambah," tuturnya.

Tidak menutup kemungkinan pula, bila pagu anggaran pada APBD induk 2018 tidak bisa mengcover seluruh siswa, maka anggaran tambahan akan dimasukkan pada APBD perubahan tahun 2018. "Jadi sekarang sekali lagi saya tekankan masih berproses," tegas Mandi.

Disamping itu, para siswa juga diberikan ongkos jahit. Peralnya, selain

pakaian olahraga, siswa diberikan seragam gratis berupa kain. Biaya yang diberikan untuk ongkos jahit yakni per satu setel Rp 100 ribu. Dengan memberikan ongkos jahit diharapkan sesuai dengan ukuran yang diinginkan.

Untuk diketahui, selain seragam baru pada tahun pelajaran 2018/2019 Pemkab Badung juga menggelontor anggaran besar untuk pengadaan laptop gratis bagi siswa SMP kelas VII. Laptop gratis totalnya mencapai 6.794 unit. Jumlah tersebut di luar jatah yang akan diberikan kepada sejumlah guru. Kepada guru jumlah laptop yang bakal dibagikan sebanyak 37 unit. Dalam pengadaan laptop tersebut, Pemkab Badung sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 61.607.563.800.

Sama seperti perlakuan pada laptop yang dibagikan ke siswa SD, laptop ini tidak serta merta menjadi hak milik. Sebab, laptop merupakan belanja modal dan menjadi aset pemerintah daerah. Sementara sekolah hanya hak pinjam pakai. Apabila laptop mengalami kerusakan, maka akan diperbaiki lantaran telah mendapat garansi selama empat tahun. asa

Edisi : Senin, 16 Juli 2018
Hal : 2